

SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN
OBJEK WISATA**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Kebong, Kecamatan Kelay Permai,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)**



Disusun Oleh:

LEONALDO PASKAL

18520213



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023

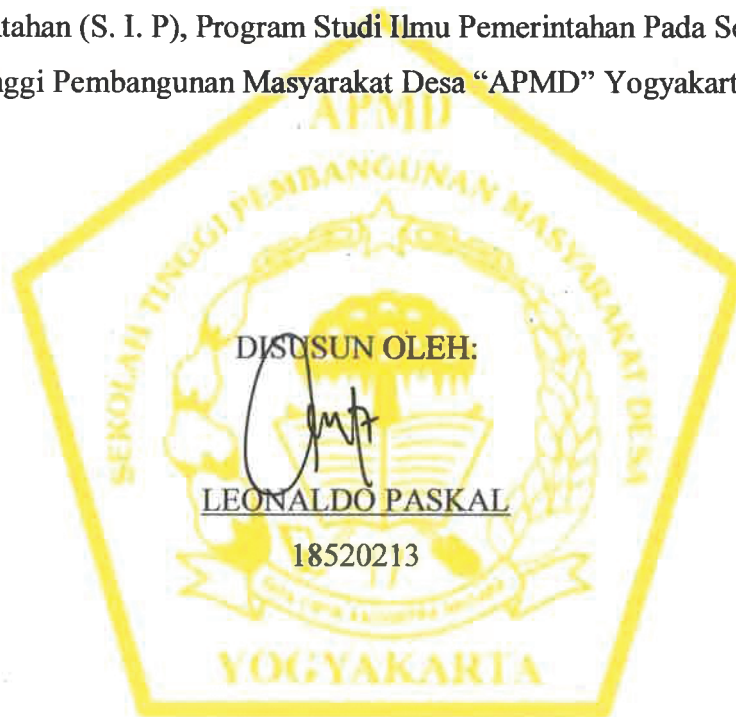
HALAMAN JUDUL

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN OBJEK
WISATA**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Kebong, Kecamatan Kelay Permai,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan (S. I. P), Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**



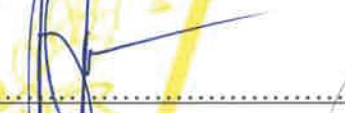
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta


APMD
TIM PENGUJI

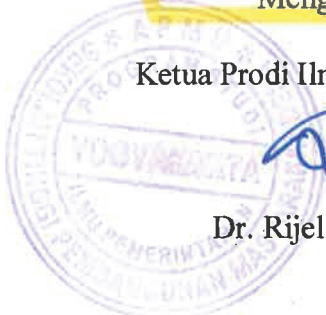
NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Ketua/Penguji/Pembimbing	
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping I	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II	

YOGYAKARTA

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leonaldo Paskal

NIM : 18520213

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN OBJEK WISATA (Penelitian di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Leonaldo Paskal

18520213

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan di Menangkan

Najwa Shihab, S.H., LL.M

Bersukacitalah dalam Pengharapan, Sabarlah dalam Kesusakan, dan Bertekunlah dalam Doa!

Roma 12:12

Semua orang memiliki gilirannya masing-masing, bersabralah dan tunggulah itu akan datang dengan sendirinya

Gold Roger

ONE PIECE Eps 849

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas Izin-nya dan berkat-nya Skripsi ini dapat dikerjakan dan di selesaikan pada waktunya
2. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Yerun Paskal dan Ibu Janah yang selama ini selalu sabar dan selalu memberi semangat, dukungan dan nasehat serta doa kepada saya
3. Kepada kakak Wenefrida Ridzalia Paskal S.Pd, Kakak Imelda Julianti Paskal Abang Theoflius Reynaldi Paskal yang selalu memberi dukungan dan kepercayaan kepada saya
4. Kepada Fransiska Deaneta Erika, A.Md,M sosok perempuan yang sampai saat ini bersama, saya ucapkan terimakasih atas dukungan, semangat, bantuan serta doa kepada saya
5. Teman-teman yang telah membantu saya selama mengerjakan skripsi Ezra, Dodi, Egi, Sigit
6. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan tahun 2018
7. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN OBJEK WISATA** (Penelitian di Desa Kebong, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dikemudian hari. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan selaku Dosen Penguji Pendamping I yang telah mengarahkan, membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. Jaka Tri Widaryanta, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
4. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji Pendamping II yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan Skripsi.

6. Semua Dosen dan Civitas Akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa Kebong beserta masyarakat Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan baik bentuk maupun isinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Penulis

Leonaldo Paskal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Literatur Review	6
F. Kerangka Konseptual	12
1. Kapasitas	12
2. Pemerintah Desa	15
3. Pemanfaatan Objek Wisata	20
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Lokasi Penelitian	28
3. Objek Penelitian	28
4. Subjek Penelitian	28
5. Teknik Pengumpulan Data.....	29

6. Teknik Analisis Data	31
BAB II GAMBARAN UMUM DESA KEBONG.....	34
A. Sejarah Desa Kebong.....	34
B. Kondisi Geografis.....	35
C. Kondisi Demografis.....	37
D. Kondisi Ekonomi.....	43
E. Kondisi Sosial dan Budaya.....	45
F. Kondisi Pemerintah Desa Kebong.....	46
G. Daftar Objek Wisata Desa Kebong.....	53
BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	54
A. Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata.....	54
1. Perencanaan.....	55
2. Pelaksanaan.....	63
B. Otoritas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata.....	70
1. Perencanaan.....	70
2. Pelaksanaan.....	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Daftar Informan.....	29
2.1. Jumlah Penduduk.....	38
2.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
2.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	39
2.4. Sarana Prasarana Pendidikan.....	41
2.5. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.....	42
2.6. Sarana Prasarana Peribadatan.....	43
2.7. Jenis Mata Pencarian.....	44
2.8. Peternakan di Desa Kebong.....	44
2.9. Daftar Nama Kepala Desa Kebong berdasarkan Periode Jabatan.....	47
2.10. Pemerintah Desa Kebong.....	48
2.11. Daftar Objek Wisata Desa Kebong.....	53

INTISARI

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil judul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata”. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu Desa Kebong merupakan desa yang berada di sekitaran Objek Wisata Bukit Kelam. Meskipun memiliki objek wisata tersebut, Pemerintah Desa Kebong belum mampu melakukan pemanfaatan secara optimal, karena dalam proses pemanfaatan pariwisata di Desa Kebong menghadapi rintangan berupa terbatasnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa. Mengingat sebagian besar Objek Wisata dikelola oleh pihak Swasta, dan belum terkoneksinya para pihak pengelola. Peran Pemerintah Desa hanya sebagai pemberi izin dan lemahnya relasi antara pihak pengelola objek wisata, sehingga pengembangan pariwisata di Desa Kebong yang berdaya saing terhambat, maka dari itu dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah dengan perspektif Governability dengan melihat Kapasitas dan Otoritas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Objek Wisata tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian berfokus pada Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Dengan jumlah responden sebanyak 12 (dua belas) orang, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan & Kesejahteraan, Kepala Dusun, BPD, Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa. Pemilihan subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling. Pada tahap analisis data peneliti menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari hasil data yang diperoleh saat penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.”. *Pertama*, Pemerintah Desa Kebong belum memiliki Kapasitas, dikarenakan dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, adalah milik perorangan dan juga dikelola oleh koperasi. Pemerintah desa hanya sebagai pendukung masyarakat dalam pemanfaatan objek wisata dengan memberikan surat izin usaha, melaksanakan pelatihan dan penyuluhan serta melaksanakan seminar bagi masyarakat yang memiliki usaha pada bidang pariwisata. *Kedua*, Otoritas dalam Pemanfaatan Objek Wisata, Pemerintah Desa Kebong memiliki Otoritas dalam Perencanaan, namun tidak memiliki Otoritas dalam Pelaksanaan. Karena otoritas tersebut dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan yang sah, mengatur dan memerintah Desa.

Kata Kunci: Governability, Pemerintah Desa, Pemanfaatan Objek Wisata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kepercayaan untuk mengurus pemerintahannya sendiri termasuk untuk mengelola keuangan, guna memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi desa untuk memanfaatkan dan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki dengan mengelola sumber daya yang ada. Namun hal ini belum tentu bisa dioptimalkan oleh pemerintah desa. Salah satu sektor yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa adalah sektor pariwisata untuk mendorong ekonomi pedesaan, mengingat tidak sedikit objek wisata di Indonesia berada di wilayah pedesaan.

Dalam pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata itu merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah desa, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Pemerintah desa sebagai fasilitator yang memiliki peran dan fungsinya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan objek dan daya tarik wisata. tidak hanya itu, penyelenggaraan terkait kepariwisataan dalam konsep *governance*.

Mengingat terdapat beberapa pelaku utama dalam pengembangan sektor pariwisata, sehingga koordinasi dan komunikasi antar pihak harus dilakukan. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan keuntungan bagi semua yang terlibat seperti masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah desa. Diketahui

jika pariwisata di Desa berhasil dapat meningkatkan ekonomi masyarakat seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa.

Kabupaten Sintang merupakan suatu daerah yang berada di barat pulau Kalimantan, memiliki berbagai macam potensi wisata. Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berupa pengembangan ekowisata di tiga kawasan: Bukit Kelam, Bukit Luit, dan Bukit Rentap (KELUTAP). Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang (2022), mengatakan “kawasan KELUTAP memiliki potensi, baik potensi sumber daya alam dan potensi sosial budaya kemasyarakatan.”

Sebagai salah satu desa yang termasuk dalam program Pemerintah Kabupaten, Desa Kebong harus tanggap dalam menyesuaikan program Kabupaten. Desa Kebong merupakan desa yang berada di sekitaran Bukit Kelam. Bukit Kelam merupakan batu terbesar yang ada di dunia, terbentang sepanjang 2-3 KM di wilayah Desa Kebong. Dengan keindahan dan keunikannya dapat menarik wisatawan untuk datang ke Desa Kebong. Tidak hanya Bukit Kelam, di Desa Kebong juga menyajikan berbagai macam objek wisata lainnya seperti Wisata Rohani Gua Maria, Agrowisata, Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kelam, Kolam renang, dan spot-spot foto. Tentu dengan adanya berbagai macam yang ada objek wisata tersebut pengembangan pariwisata menjadikan salah satu prioritas utama bagi Pemerintah Desa Kebong mengingat pembangunan pariwisata menjadi salah satu strategi pemerintah desa dalam upaya peningkatan ekonomi, membuka kesempatan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa.

Meskipun memiliki objek wisata yang ada di Desa Kebong, namun pengembangannya belum optimal. Proses pengembangan pariwisata di Desa Kebong menghadapi rintangan berupa terbatasnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa untuk mengatur mengingat sebagian besar di objek wisata dikelola oleh pihak Swasta, dan belum terkoneksinya para pihak pengelola. Menurut observasi peneliti bahwasannya setiap objek wisata yang ada di Desa Kebong sebagian besar diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat dan pelaku usaha, hanya Wisata Rohani Gua Maria yang pemerintah desa ikut serta dalam inisiasinya. Peran Pemerintah Desa hanya sebagai pemberi izin, sehingga lemahnya relasi antara pihak pengelola objek wisata. Lemahnya relasi antar *stakeholder* pariwisata di desa Kebong ini menyebabkan sulitnya penentuan arah kebijakan dan program, sehingga pengembangan pariwisata desa Kebong yang berdaya saing terhambat.

Desa Kebong juga termasuk dari salah satu wilayah yang masuk dalam rencana Kabupaten Sintang dalam pengembangan wisata, tentu semua pihak yang terlibat harus siap. Menanggapi ini Pemerintah Desa perlu membuat program yang sinergis dengan Pemerintah daerah.

Tidak hanya melalui program kerja Pemerintah Desa Kebong harus berkomitmen dengan cara mendukung dengan berbagai cara, salah satunya dengan mendukung melalui aksesibilitas, bekerjasama dengan pihak pengelola pariwisata dengan mempromosikan objek wisata yang ada di desanya. Dari hasil observasi diketahui bahwa akses untuk menuju lokasi belum ada kendaraan umum, jalan yang masih berlubang tentu mempengaruhi minat wisatawan menuju ke Desa Kebong, dan perlu dilakukan perawatan fasilitas wisata seperti toilet umum juga perawatan kebersihan objek wisata sendiri.

Pemanfaatan Objek Wisata yang baik adalah Pemanfaatan yang melibatkan Masyarakat, karena Masyarakat adalah objek Pembangunan yang ada di Desa. Dalam Pemanfaatan objek di Desa Kebong, diketahui bahwa masyarakat mempunyai peran berupa menyediakan parkir, warung, dan dengan terlibatnya masyarakat tentu dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat namun dikarenakan kebiasaan wisatawan yang datang ke objek-objek wisata cenderung hari *weekend* sehingga pada hari kerja warung-warung sering tutup. Hal ini menyebabkan wisatawan yang datang pada hari biasa mengalami pelayanan yang kurang.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata demi terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut tentulah pemerintah desa harus memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain hal tersebut, Pemerintah desa dalam pemanfaatan objek wisata harus melalui proses seperti perencanaan. Karena tanpa perencanaan maka setiap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tidak terarah, namun sebaliknya, jika ada rencana maka dapat diketahui apa yang harus dilakukan. Rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah dan kebutuhan pada masyarakat desa, untuk mendorong dan mengendalikan pariwisata di desa. Kapasitas itu sendiri dapat dilihat dari dua hal, yaitu pertama, kapasitas pemerintah sebagai ekstraktif yaitu peranan pemerintah dalam mengoptimalkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas. Kedua, kapasitas pemerintah sebagai distributive yaitu kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum

keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hamper di seluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Potensi pariwisata yang ada di Desa Kebong perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, terpadu dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha serta meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang Pembangunan Desa Kebong. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengangkat judul *Governability* Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Kebong dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desanya?”

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Kemampuan Pemerintah Desa Kebong dalam Pemanfaatan Objek Wisata yang ada di Desa Kebong.
2. Otoritas Pemerintah Desa Kebong dalam pemanfaatan objek wisata yang ada di Desa Kebong.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Kapasitas Pemerintah Desa Kebong dalam memanfaatkan pariwisata yang di Desa Kebong

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Penelitian diharapkan nantinya dapat menambah ilmu dan memperluas informasi untuk mendukung pemanfaatan objek wisata yang ada di Desa Kebong
- Dan juga dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Desa Kebong dapat dijadikan sebagai rekomendasi informasi dalam memanfaatkan objek wisata yang ada di desanya.
- Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana memanfaatkan potensi pariwisata yang ada.
- Hasil dari penelitian ini dapat menjadi penambahan wawasan baru mengenai bagaimana pemanfaatan objek wisata.

E. Literatur Review

Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan serta acuan untuk penelitian yang penulis akan dilakukan:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh RU Putri (2022), yang berjudul “*Governability* Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan” di Kalurahan Canden:

Governability merupakan kapasitas pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta untuk mengatur masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut. Menurut Piere dan Peters, *Governability* juga dapat dipahami sebagai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mempunyai pola saling ketergantungan dan membutuhkan. Pola tersebut, berasal dari adanya regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Sehingga, dengan adanya regulasi dan peraturan tersebut pemerintah mampu mengatur dan mengurus segala kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil dari penelitian RU Putri menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Kalurahan Canden kuat karena telah mampu menjalankan kewenangan lokal berskala desa sehingga desa mampu secara *governability*. Namun, dalam hal pemanfaatan Tanah Kasultanan, terjadi benturan tentang pengaturan tanah tersebut, yakni antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakibatkan desa atau kalurahan di DIY tidak berdaya dalam hal pengelolaan Tanah Kasultanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa.

2. Dalam paper penelitian yang dilakukan oleh Heru Cahyono Dkk (2019), yang berjudul Penguatan *governability* dalam pengelolaan dana desa.

Tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Bagaimana penguatan Pemerintah Desa yang berjalan simultan dibarengi dengan penguatan demokrasi di tingkat Desa sehingga memungkinkan terjadinya proses pengelolaan dana desa yang partisipatif.

Penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal ini memiliki sejumlah indikator, *pertama*, secara institusional seberapa jauh Pemerintah Desa mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, baik dalam menyelenggarakan perencanaan, melaksanakan pembangunan, dan penguatan kompetensi administrative, SDM, kepemimpinan, dan pengelolaan anggaran; *kedua* secara komunitas, bagaimana pemerintah desa mampu menjalankan fungsi pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mewujudkan pemerintah desa yang akomodatif, aspiratif, dan partisipatif.

Dalam praktiknya setelah 3 tahun Dana Desa berjalan diketahui terdapat problematika mendasar mengenai lemahnya sumber daya manusia dari para perangkat desa, ada juga permasalahan di mana peraturan teknis yang masih membingungkan antara Kemendagri dan Kemendes PDTT serta rawannya Dana Desa untuk di korupsi, Sehingga perlu diadakan program pembinaan terhadap perangkat desa dari pemerintah supra desa serta penguatan pengawasan terhadap pemerintah desa.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nesi Marceta (2022), yang berjudul Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo.

Secara umum kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, menyelesaikan masalah, menargetkan dan mencapai tujuan. Dengan kata lain, pemerintah desa harus memiliki kapasitas mumpuni dan dinilai cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Dalam kaitannya untuk menerangkan kapasitas teknokratik maka

bentuk kapasitas pemerintah desa yang dapat digunakan antara lain; Kapasitas Regulasi, Kapasitas Ekstraktif, Kapasitas Distributif, dan Kapasitas Politik.

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam pemanfaatan objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo belum berjalan efektif, dengan alasan karena pemerintah desa dalam regulasi objek wisata Tebing Breksi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemerintah desa dalam distributif belum adil dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa belum terpenuhi kebutuhan sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kalurahan dalam politik sudah bisa berjalan cukup baik, alasannya dalam membuat perencanaan kebijakan untuk bekerjasama sudah sesuai dengan apa yang dibuat di RPJM Kalurahan Sambirejo.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subhan Agung (2012), yang berjudul Negara dan Lemahnya Governability di Kecamatan Sukaratu.

Lemahnya pengendalian pemerintah daerah terhadap para pelaku bisnis penambangan pasir Galunggung menunjukkan lemahnya *governability* pemerintah. Pemerintah yang seharusnya mampu memoderatori persaingan pihak swasta yang membahayakan kepentingan publik. Berdasarkan realita di lapangan, masyarakat sudah “muak” dengan eksploitasi pasir Galunggung yang menuai dampak negatif, bahkan dalam jangka panjang dikhawatirkan akan menghapus potensi mata pencaharian masyarakat sekitar. Pemerintah harus secepatnya mampu mengendalikan para pelaku usaha termasuk mereklamasi lahan-lahan yang sudah tidak terpakai.

Dari situasi problematik tersebut, harus secepatnya dicari solusinya lewat kebijakan pemerintah. Eksploitasi besar-besaran tanpa melihat dampaknya seperti yang terjadi di Galunggung adalah “kecelakaan sejarah” yang siap mengancam mata pencaharian penduduk Sukaratu. Melihat problematika tersebut kebijakan pemerintah harusnya: tidak policy-bias, dimana kebijakan pemerintah dalam pemberian izin investasi jangan hanya mengutamakan komoditi ekspor, pemodal yang besar saja, namun juga harus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada.

Selain itu juga pemerintah melakukan manajemen sumber daya dan lingkungan. Tidak hanya mementingkan pemasukan yang besar dari para investor, tetapi juga memperhatikan nasib pengusaha kecil dan menengah yang mata pencahariannya mungkin terganggu dan terhancurkan dengan investor swasta dengan skala besar. Kalau sudah terjebak, maka yang terjadi jikalau ada gugatan dari masyarakat, maka jawabannya adalah hal tersebut sudah sesuai prosedur. Ironisme inilah yang semakin meyakinkan kita bahwa kualitas governability negara saat ini sangat lemah.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh SA Padji (2022) yang berjudul *Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Sumber Daya Alam di Kalurahan Umbulharjo*.

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo merintis diri sebagai aktor sekaligus institusi yang responsif dan tanggap terhadap prakarsa masyarakat. Persoalan di Kalurahan Umbulharjo saat ini yaitu terkait pengelolaan SDA yaitu potensi wisata dan air bersih yang belum diproteksi dan didistribusi secara merata. Untuk itu, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo sedang merancang Peraturan

Kalurahan untuk melindungi SDA agar dikelola, dilindungi dan didistribusikan kepada rakyat secara adil.

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa otoritas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo memiliki keabsahan (legitimasi) yang dihubungkan dengan hukum. Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di Kalurahan Umbulharjo sekaligus menuntut adanya kepatuhan dan ketaatan. Sementara itu, kapasitas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam pengelolaan SDA yaitu: *Pertama*, kapasitas responsif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang dijadikan sebagai basis dan kebijakan pembangunan kalurahan yaitu potensi wisata potensi wisata dan distribusi air bersih. *Kedua*, kapasitas ekstraksi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset kalurahan. Hal terkait dengan identifikasi potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo. *Ketiga*, kapasitas regulasi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu membuat peraturan tentang potensi wisata dan kebijakan terkait biaya sewa air bersih. *Keempat*, kapasitas distributif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mendistribusikan air secara adil dan merata. *Kelima*, kapasitas ekstraksi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo melakukan pengembangan jaringan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mendukung dan mengelola potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo.

Literatur di atas menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga memiliki sedikit kesamaan dalam perspektif. penelitian ini menggunakan konsep *governability* yang disampaikan oleh Rozaki (2005) sebagai kapasitas.

Tentang kapasitas pemerintah yaitu kapasitas regulatif (bagaimana proses membuat aturan), kapasitas ekstraktif (bagaimana mengoptimalkan program pemerintah), kapasitas distributif (bagaimana pemerintah membagi sumber daya sehingga bisa seimbang dan merata), dan yang terakhir kapasitas politik (dilihat dari respon pemerintah dalam kerja sama antar stakeholder dan masyarakat) dalam pemanfaatan objek wisata yang ada di Desa Kebong. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi, berbeda dengan di daerah pulau Jawa, Di Kalimantan terkhususnya Desa Kebong banyak sekali potensi Pariwisata namun kapasitas pemerintah dalam belum tanggap dalam perkembangan pariwisata.

F. Kerangka Konseptual

1. Kapasitas

Kapasitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibebankan atau tidak dibebankan kepada pelaku kegiatan/aktivitas. Kalau berbicara konsep kapasitas tidak lepas dari konsep *Governability*. *Governability* dalam konteks pemerintah desa dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah desa (Kepala desa, BPD dan perangkat desa) dalam mengemban tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. (Marceta, 2022).

Menurut Moenir (2002) kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan. Morgan (2006) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan,

keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Sedangkan Millen (2012) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Menurut Rozaki (2005) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan yang mengandung arti keahlian, keterampilan dan profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kinerja. Rozaki juga menyampaikan kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu; *pertama*, Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat; *kedua*, Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat; *ketiga*, Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa; *keempat*, kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dan perencanaan kebijakan pembangunan desa; dan *kelima* kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Ada banyak definisi kapasitas yang telah dikemukakan oleh para pakar di atas, namun berbeda dengan Freddy Rangkuti (2005: 94), ia mengatakan bahwa kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu. Sementara menurut Sumayang (2003: 99) kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari fasilitas biasanya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode waktu, peramalan permintaan yang akan datang akan memberikan pertimbangan untuk merancang kapasitas.

Dari beberapa pengertian di atas kapasitas sangat berkaitan dengan konsep *governability* yang disampaikan oleh Sutoro Eko dalam bukunya “Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan”, menyebutkan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Secara harafiah, *governability* berarti *ability of government in governing*, kemampuan *Pemerintah* dalam memerintah. Terdapat 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut pandang yang memerintah (*governing*) terutama Pemerintah;
- b. Sudut yang diperintah (*governed*). Negara sebagai subjek yang diperintah oleh Pemerintah. Namun umumnya, banyak bicara tentang warga, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi;
- c. Sudut interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang *governance*.

Sutoro Eko juga menyampaikan bahwa *Governability* mengandung 5 (lima) dimensi, yaitu kapasitas, otoritas, aktivitas, efektivitas memerintah dan legitimasi yang dilakukan Pemerintah. Dengan menggunakan 5 dimensi *governability* tersebut, *governability* dapat diartikan sebagai kemampuan Pemerintah dalam

memerintah sesuai dengan regulasi dan pelayanan. Negara sebagai subjek yang diperintah oleh Pemerintah dan terdapat interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dalam memberikan perintah, Pemerintah menggunakan otoritas untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat.

Dari beberapa konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas sama halnya dengan *governability*, sebab *governability* adalah berbicara tentang otoritas dan kapasitas atau kemampuan pemerintah desa dalam memimpin masyarakat desa. Untuk mengukur kapasitas tersebut, dapat diukur dari beberapa dimensi yaitu, kapasitas regulasi, kapasitas ekstrasi, kapasitas distributif, kapasitas responsif dan kapasitas jaringan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa.

2. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan, Pemerintahan Desa yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan wewenangnya. Didalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, juga disampaikan tugas Kepala desa yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas wilayah dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Untuk memahami apa itu pemerintah desa, perlu mendalami konsep dari pemerintah desa. Menurut Sutoro Eko (2021), pemerintah (*Government*) adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, biokrasi, negara, atau sektor public melainkan Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen.

Sutoro eko juga menyampaikan makna dari pemerintah yaitu: *Pertama*, pemerintah sebagai subjek. Jika mengikuti logika idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa siapa yang memerintah tidak mesti pemerintah. Karena secara *de facto* ada banyak subjek yang memerintah, seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat. Pemerintah sebagai subjek memiliki makna idealisme filosofis yang dalam. Dari Karl Polanyi (1994), kita tahu bahwa pemerintah dibuat untuk keperluan distribusi dan proteksi, terutama perlindungan orang-orang lemah dari rampasan kaum elite. Pemerintah dibentuk oleh rakyat dan pemerintah bekerja untuk membebaskan warga sebagai pemilik negara.

Konsep pemerintah mengacu pada subjek yang memberikan atau menjalankan pemerintahan. Subjek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Kepala Desa, Bupati/Wali kota, Gubernur dan Presiden) atau lembaga (misalnya Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Republik Indonesia). Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif dan legislatif.

Kedua, pemerintah predikat dan objek. Selain berkaitan dengan subjek, pemerintah juga berkaitan dengan predikat dan objek yaitu apa dan siapa yang diperintah. Kata “apa” yang diperintah memiliki elemen luas tidak hanya berbicara perkantoran dan administrasi atau pagar kantor Bupati, tetapi kata “apa” sejatinya berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak mengandung relasi kuasa antara pemerintah dengan orang-orang yang berkepentingan misalnya; berbicara terkait beras maka akan bertemu bermacam-macam aktor seperti petani, tengkulak, pedagang, dan konsumen. Kata “siapa” yang diperintah adalah negara, warga, dan masyarakat. Lalu, kata “di mana” menyebut tempat atau arena bagi proses memerintah baik pada bentuk komunitas, desa, daerah, negara, dan dunia.

Ketiga, pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah dalam masyarakat (*local selfgovernment*) yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekedar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna *ordering the state*) melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” memberikan distribusi dan proteksi kepada warga sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan bersyarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela (Margaret Levi, 2006).

Pemerintah dalam masyarakat adalah milik rakyat, yang dibentuk cara politik oleh rakyat. Rakyat adalah konsep politik. Negara adalah milik warga. Warga adalah subjek hukum yang memiliki persamaan hak-kewajiban terhadap negara. Pemerintah bukan sekadar penyelenggara negara. Pemerintah berbeda dengan negara. Birokrasi adalah *the real state*. Negara bersifat statis yang tidak berhubungan dengan demokrasi, melainkan berhubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi, dan koersi. Demokrasi berada pada ranah pemerintah, yang membuat pemerintah lebih dinamis dalam melakukan tindakan politik dan membuat hukum. Hukum bukan hanya membatasi kekuasaan, tetapi ia adalah ekspresi kehendak politik dan otot besar pemerintah (*the great sinew of government*) untuk memerintah negara.

Pemerintah merupakan salah satu elemen dari negara. Artinya, pemerintah menjadi bagian dari negara. Pemerintah merupakan sebagai aktor-insitusi yang menyelenggarakan negara. Hal yang paling fundamental harus dipahami adalah pemerintah dan negara merupakan dua insitusi yang berbeda. Pemerintah bersifat dinamis, silih berganti secara berkala sedangkan negara bersifat statis dan permanen, kecuali bubar dan pecah-pecah. Pemerintah jika diartikan adalah sebagai insitusi dan arena berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Dalam negara modern, pemerintah sering diartikan sebagai otoritas tertinggi (*supreme authority*) yang menyelenggarakan, memerintah, mengatur, mengurus negara, termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi.

Tugas pemerintah adalah memerintah negara, agar negara melindungi dan melayani warganya. Secara esensial pemerintah memiliki dua fungsi yaitu: Pertama, melindungi (*protection*). Dalam konteks ini, tentunya yang dilindungi adalah

rakyatnya. Contohnya, pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elite (*elite capture*) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak. *Kedua*, membagi (*distributing*). Hal ini berarti bahwa pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor-institusi yang kuat, dimana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pemerintah desa atau yang disebut kepala desa merupakan sebuah aktor sekaligus institusi yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam menjalankan kewenangannya pemerintah desa mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015: 101-103).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pemerintah desa adalah Kepala Desa, merupakan aktor yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan masyarakat. Kepala Desa bertugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa..

3. Pemanfaatan Objek Wisata

Menurut *Kamus besar Bahasa Indonesia* pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan merupakan suatu proses/aktivitas memajukan sesuatu dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi lebih menarik dan berkembang. Pengembangan pariwisata yaitu usaha untuk meningkatkan atau melengkapi fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan agar merasa nyaman saat berada di tempat wisata.

Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang (Yoeti, 1995: 57).

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan baik itu keuntungan bagi wisatawan maupun keuntungan bagi masyarakat setempat. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Bagi masyarakat setempat manfaatnya dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Namun jika dalam pengembangannya itu maka dipersiapkan dan dikelola dengan sangat baik maka dapat juga menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan wisatawan ataupun masyarakat. Maka dari itu untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan

berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat maka perlu pengkajian secara mendalam terhadap sumber dan daya pendukungnya.

Pengembangan kepariwisataan tidak luput dari pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Pasal 5 menyatakan bahwa pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata kemudian Pasal 6 menyatakan bahwa pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
- c. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup.
- d. Kelangsungan pariwisata itu sendiri.

Dalam penelitian ini pengembangan wisata di desa Kebong sudah berjalan, dalam hal langkah dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan wisata adalah:

- a. Melakukan kebijakan pengembangan objek dan daya tarik wisata.

Pengembangan objek dan daya tarik wisata menyangkut aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi berdasarkan pendekatan pembangunan satuan kawasan wisata dengan nuansa nilai agama, budaya, estetika, dan moral yang dianut oleh masyarakat.

- b. Pembangunan objek wisata

Upaya yang dapat dilakukan untuk pembangunan objek wisata adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi dan lain sebagainya, khususnya dibidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan sebagai modal tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial, sedangkan pelatihan perlu tugas menerima dan melayani wisatawan dan tenaga kerja produksi.

2) Kemitraan

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola objek wisata dengan pemerintah desa atau pengusaha pariwisata dalam hal ini Dinas Pariwisata Daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan dan sebagainya.

3) Promosi

Kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi objek wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga dan sebagainya dapat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

4) Festival

Kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi objek wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian,

pertandingan olahraga dan sebagainya dapat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

5) Perbaiki infrastruktur pariwisata

Untuk memperkaya objek dan daya tarik wisata di suatu desa wisata, dapat dibangun berbagai infrastruktur antara lain pembangunan *homestay* agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan atau membangun *guest house* berupa *bamboo house*, *tradisional house*, *log house* dan lain sebagainya. Pembangunan jalan, sumber energi, sarana olahraga, sarana pendidikan, gedung pertunjukan, tempat pembuangan limbah dan sampah, sarana komunikasi, terminal dan lain-lain.

6) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

a. Penyiapan sistem perencanaan tata letak dan tata ruang kawasan wisata.

Memberikan arahan yang jelas agar bisa menjadi pengembangan pariwisata berdasarkan karakteristik keruangan melalui zonasi pengembangan. Untuk kemudahan pembangunan dan pengolahan yang perlu dilakukan adalah pengelompokkan objek daya tarik wisata pada satuan kawasan wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisata agar memunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata. melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan objek dan juga daya tarik wisata.

b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata.

Akses informasi dengan adanya kemajuan manusia untuk menyalurkan segala bentuk keinginannya telah menjadikan dunia ini

sebagai suatu tempat tanpa batas. Masukan informasi lengkap tentunya akan menyebabkan para wisatawan semakin mudah untuk menyeleksi kawasan-kawasan yang akan dikunjungi. Informasi itu dapat berupa promosi dan publikasi. Promosi adalah kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif singkat. Promosi juga merupakan salah satu program pemasaran.

Meskipun suatu produk memiliki kualitas yang baik, namun bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Untuk itu dalam mengadakan promosi yang tepat harus disadari bahwa yang didistribusikan ke pasar itu sering bukan produk yang sudah jadi tapi hanya komponen-komponennya saja atraksinya dan fasilitasnya. Komponen-komponen tersebut masih harus bisa menjadi sebuah produk pariwisata yang lengkap yakni perjalanan ketempat wisata dengan menggunakan sarana angkutan roda empat maupun angkutan roda dua, untuk mengunjungi objek wisata yang ingin dikunjungi. Sedangkan publikasi harus berusaha lebih menyesuaikan produk dengan permintaan pasar, maka publikasi berusaha menciptakan permintaan dan mempengaruhi permintaan dengan cara menonjolkan kesesuaian produk pariwisata dengan permintaan. Publikasi dapat berupa pempfelt, brosur serta publikasi lewat media masa.

Akses kondisi jalan menuju objek wisata dan jalan akses itu harus berhubungan dengan prasarana umum. Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksesibilitas suatu objek wisata. aksesibilitas ini merupakan

syarat yang penting sekali untuk objek wisata. selanjutnya sebagai tempat akhir perjalanan di tempat objek wisata harus ada internal, setidaknya tempat parkir. Baik jalan akses maupun tempat parkir harus sesuai dengan kebutuhan yaitu sesuai dengan jumlah wisatawan yang diharapkan yang diharapkan kedatangannya dan jenis serta jumlah kendaraan yang diperkirakan akan digunakan oleh parkir wisatawan.

c. Pemenuhan standar fasilitas di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan.

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (Suwantoro, 1997: 21).

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlakukan koordinasi yang matang antara instansi terkait bersama dengan instalasi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan instansi terkait dengan membangun

prasarana wisata sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata di kalurahan. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata.

Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah dan sebagainya yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja yang dimaksud prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian, dalam hal ini adalah sektor pariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi fungsinya adalah melengkapi sarana pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana semestinya.

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya (Suwanto, 2004: 21).

Dari konsep di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam pemanfaatan pariwisata merupakan suatu proses pengembangan dari pariwisata itu sendiri, yang tidak luput dari proses perencanaan dan pembangunan dari pariwisata.

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012). Sehingga dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sebuah hal yang sangat penting.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu kelompok manusia, obyek, kondisi, sistem pemikiran dan pariwisata pada masa sekarang. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati dan juga melakukan fenomena dengan menetapkan standar dan norma.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang mana metode deskriptif itu sendiri merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kebong, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan melihat di Desa Kebong memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi namun dalam pemanfaatannya belum maksimal.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut sosial situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiono dalam Prastowo, 2012:199). Maka objek penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa Kebong dalam Pemanfaatan Objek Wisata.

4. Subjek Penelitian

Suharsimi Arikonto (2016:26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang peneliti amati.

Penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85), purposive sampling merupakan Teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti memilih narasumber berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan data yang memang dibutuhkan. Terkait penelitian kualitatif narasumber atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dari pengertian diatas dapat di tentukan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala desa beserta perangkatnya, BPD, pihak pengelola objek wisata dan masyarakat yang sadar akan pariwisata desa Kebong. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Daftar Informan

No.	Nama	Umur	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Jabatan
1.	Duman,S.Sos	48	L	S1	Pemdes	Kepala Desa
2.	Lisda, S. Sos	41	P	S1	Pemdes	Sekretaris Desa
3.	Rubina	38	P	SMA	Pemdes	Kaur Keuangan
4.	Hieronimus	43	L	SMK	Pemdes	Kasi Pelayanan & Kesejahteraan
5.	Liborius Andi	45	L	SMA	Pemdes	Kepala Dusun
6.	Fransiskus S.	47	L	SMA	Pemdes	Kepala Dusun
7.	Anton Irwan	43	L	SMA	BPD	Ketua BPD
8.	Darmin	41	L	SMK	Pedagang	Ketua BUMDes
9.	Sukanto	38	L	SMP	Petani	Masyarakat
10.	Jeliyanti	35	P	SMA	Petani	Masyarakat
11.	Andreas	46	L	SMA	Wiraswasta	Masyarakat
12.	Susilawati	42	P	SMA	Swasta	Masyarakat

Sumber: Data Lapangan Peneliti, 2023

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan bagi seorang peneliti datang ketempat untuk melihat dan merasakan secara langsung sehingga menemukan data-data

yang valid. Peneliti, dalam melakukan pengumpulan data, menyatakan terus terang pada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Namun, dalam suatu saat tertentu, peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau ada suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2016:108).

Observasi dilakukan guna mendapatkan data pendahuluan untuk penulisan latar belakang dan mendapatkan data penelitian terkait jalannya pengelolaan tempat wisata. Data yang diperoleh adalah kondisi terkini Agrowisata yang ada di wilayah Desa Kebong, yang terkait keadaan infrastrukturnya, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya.

b) Wawancara

Wawancara sangat diperlukan di dalam penelitian di mana peneliti membutuhkan relasi antar narasumber, berbicara secara langsung data-data secara langsung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sugiyono (2018:140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Wawancara dilakukan guna mendapatkan data secara jelas dan konkrit tentang strategi pengelolaan wisata di wilayah Desa Kebong oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Peneliti menggunakan metode ini sebagai petunjuk wawancara yang hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi

wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara, dimana dokumentasi adalah sebuah cara menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Dalam objek penelitian ini dokumentasi sangat bermanfaat karena dapat melengkapi data penelitian bagi peneliti.

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan arsip-arsip terkait data pengelolaan objek wisata di Desa Kebong. Selain itu, melalui teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data berupa foto-foto terkait infrastrukturnya, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2016:131) dalam penelitian kualitatif, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles & Huberman (dalam Sugiyono 2016:249), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif,

yaitu (1) reduksi data; (2) paparan data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Alur dalam teknik analisis data melalui beberapa tahap yaitu:

a) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016:249) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:249) menyatakan bahwa “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Hal ini dilakukan peneliti melalui pengolahan data yang telah dihasilkan guna mempersingkat dan memperjelas hasil dari reduksi data sebelumnya,

sehingga data yang disajikan lebih terorganisir untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2016:253) mengartikan bahwa kesimpulan dalam penelitian temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori-teori. Sehingga dengan adanya kesimpulan, peneliti dapat menjawab segala rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi hasil tersebut masih bersifat sementara karena dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada, supaya hasil penelitiannya jelas dan dapat dirumuskan kesimpulan akhir yang akurat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. Sejarah Desa Kebong

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah asal usulnya. Desa Kebong merupakan desa yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 1987 sebelum Kecamatan Kalam Permai di mekarkan, Desa Kebong sudah ada dan masih termasuk dalam Kecamatan Sintang. inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah Desa Kebong berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya Desa Kebong.

Dari cerita masyarakat dapat disampaikan bahwa nama-nama dusun yang ada di Desa Kebong bermula dari: Dusun Kenukut diambil dari nama sungai yang ada di dusun Kenukut, Dusun Kalam Raya karena dusun tersebut berada di sekitar jalan raya kalam, Dusun Jemelak Hulu berdasarkan nama sungai yang melintasi jalan dusun tersebut, Dusun Sungai Kalam diambil dari nama sungai yang ada di dusun tersebut, Dusun Sungai Putau diambil dari nama sungai yang ada di dusun tersebut, Dusun Sebungkang di ambil dari nama Sungai Sebungkang yang berada di dusun tersebut, Dusun Dait diambil dari nama sungai yang ada di dusun tersebut, kemudian Dusun Kebong diambil dari asal usul nama Tembawang Lama yang berada di dusun tersebut.

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita asal usul Desa Kebong tersebut diatas, hendaknya kita menghormati cerita yang berkembang dan

bukti-bukti pendukung sejarah yang dijaga secara turun menurun oleh masyarakat Desa Kebong sebagai sebuah kearifan lokal. Kita sebagai generasi penerus berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

B. Kondisi Geografis

Desa Kebong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Desa Kebong Sebagian besar merupakan hutan, perbukitan dan sungai. Berdasarkan tata letak alam dan penyebaran geografisnya, Desa Kebong memiliki tipologi persawahan, perladangan, perkebunan, perikanan, kerajinan, industry besar dan kecil, serta jasa dan perdagangan.

Desa Kebong mempunyai luas wilayah sebesar 2.600 hektar, dan diperuntukan bagi:

- Tanah Sawah : 180,00ha
- Tanah Tegalan/Ladang : 600,00 Ha
- Pemukiman : 100,00 Ha
- Pekarangan : 120,00 Ha
- Perkebunan : 492,70 Ha
- Lapangan Olahraga : 0,30 Ha
- Perkantoran Pemerintah : 0,50 Ha
- Tempat Pemakaman Umum : 0,50 Ha
- Bangunan Sekolah : 40 Ha
- Pertokoan : 8 Ha
- Hutan Rakyat : 443,00 Ha

Untuk Orbitasi (Jarak dari pusat Pemerintahan Desa) sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti, yaitu jarak dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih harus menempuh sejauh 1 km, dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit menggunakan kendaraan motor. Sedangkan untuk jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih 20 km dan jarak dari ibu kota provinsi kurang lebih 367 km. Adapun Batas wilayah Desa Kebong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Nanga Jetak Kecamatan Kelam Permai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Jerora Satu Kecamatan Kelam Permai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa : Merpak Kecamatan Kelam Permai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samak Kecamatan Kelam Permai.

Desa Kebong memiliki Visi dan Misi demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun Visi dan Misi tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

**“ Menjadikan Desa Kebong Yang Mandiri, Sebagai
Kawasan Ekonomi Kreatif, Mengembangkan
Agrowisata Dan Budaya Untuk Mencapai Masyarakat
Yang Sejahtera ”**

Dalam meraih Visi Desa Kebong seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa Kebong sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik dan Menata Kelola Pemerintah Desa Kebong dengan baik sesuai dengan system dan aturan yang berlaku.
- 2) Mengembangkan Agrowisata di bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
- 3) Mempertahankan, Mengembangkan dan Melestarikan Adat Istiadat Sera Budaya Masyarakat yang ada.

- 4) Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun dsism wilayah Desa Kebong.
- 5) Bekerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas Terkait dalam pemberian bantuan Bedah Rumah Layak Huni.
- 6) Bekerjasama dengan Dinas terkait untuk sertifikat Tanah bagi Masyarakat Desa Kebong.
- 7) Menciptakan Hubungan Yang Harmonis, Aman dan Damai, serta membangun sikap yang adil dan Toleransi yang tinggi anatar umat beragama.
- 8) Mewujudkan Sistem Usahamandiri melalui program pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES).
- 9) Menggalo Potensi Desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- 10) Mendorong Pengusulan Proses Pemekaran desa.

C. Kondisi Demografis

1. Penduduk

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Desa Kebong memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.753 jiwa dan 582 Kepala Keluarga, terdiri atas 8 Dusun dan 16 RT. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk

No.	Dusun	Jumlah (RT)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Kebong	2	325	11,80
2.	Sugai Putau	2	311	11,30
3.	Kenukut	2	305	11,08
4.	Kelam Raya	2	835	30,33
5.	Jemelak Hulu	2	257	9,33
6.	Dait	2	265	9,63
7.	Sebungkang	2	243	8,83
8.	Sungai Kelam	2	212	7,70
Total		16	2.753	100,00

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Kebong memiliki 8 dusun dan 16 RT. Pembagian RT di Desa Kebong pada setiap dusun masing-masing memiliki 2 RT. Dengan mayoritas penduduk terdapat di Dusun Kelam raya, yaitu sebanyak 835 jiwa atau sekitar 30% dari total jumlah penduduk di Desa Kebong. Dan penduduk paling sedikit terdapat di Dusun Sungai Kelam, dengan jumlah penduduk sebanyak 212 jiwa atau sekitar 8% dari total jumlah penduduk.

Namun walaupun demikian jika diperhatikan Kembali pada tabel di atas, bahwa di Desa Kebong pada setiap Dusun yang ada tidak terlalu banyak perbandingan jumlah penduduknya. Hanya saja di Dusun Kelam Raya paling banyak penduduknya, hal ini terjadi dikarenakan Dusun Kelam Raya adalah pusat Desa Kebong. Selain hal tersebut, ternyata di Desa Kebong penduduk berdasarkan jenis kelamin juga tidak memiliki perbedaan jumlah penduduk yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	1.419	51,54
2.	Perempuan	1.334	48,46
Total		2.753	100,00

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Desa Kebong, mayoritas penduduk jika dilihat dari jenis kelamin adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.419 jiwa atau sekitar 51,54% dari total jumlah penduduk. Dan hanya memiliki selisih 3,08% dengan penduduk berjenis kelamin Perempuan.

2. Pendidikan

Pada Desa Kebong sendiri tingkat pendidikan sudah cukup baik, mayoritas penduduk sudah menempuh pendidikan, walaupun masih terdapat beberapa penduduk yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Penduduk Desa Kebong sudah sadar akan pentingnya pendidikan, pendidikan adalah cara untuk menambah ilmu pengetahuan pada penduduk desa. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Kebong, dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	110	115	225	8,17
2.	Tamat SD	187	165	352	12,79
3.	Tamat SLTP	277	287	564	20,49
4.	Tamat SLTA	688	723	1.411	51,25
5.	Tamat Akademi/PT	89	112	201	7,30
Total				2.753	100,00

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Kebong mayoritas tamat SLTA atau SMA/SMK sederajat dengan jumlah 1.411 jiwa, sekitar 51,20% dari total jumlah penduduk dan melebihi setengah dari penduduk Desa Kebong. Dengan minoritas tamat Akademi atau Perguruan Tinggi, hanya sebanyak 201 jiwa atau sekitar 7,30% dari total jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. Dan hanya memiliki selisih 0,70% dari penduduk desa Kebong yang tidak tamat SD.

Dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan yang ada di Desa Kebong, tentulah Pemerintah Desa Kebong harus menyediakan tempat atau Sarana Prasaran agar proses kegiatan pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena dengan adanya pendidikan seseorang mendapatkan pengetahuan. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian dimasyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi keahlian pada masyarakat yang nantinya akan mendorong keterampilan, kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Melalui pos-pos anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa Kebong. Berikut Sarana Prasarana Pendidikan yang ada di Desa Kebong, terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah (Buah)
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD	2
4.	SMP	1
5.	SMA	1
6.	SMK	1
Total		7

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Kebong memiliki 7 buah Sarana Prasarana Pendidikan dalam menunjang proses kegiatan Pendidikan yang ada, terdiri dari Gedung PAUD sampai Gedung SMK. Gedung-gedung tersebut memiliki fungsinya masing-masing sesuai tingkatan pendidikan yang ada. Dimana masing-masing tingkatan Pendidikan yang ada, memiliki 1 gedung dan hanya Gedung SD yang memiliki 2 gedung atau sekitar 28,57% dari total jumlah Gedung yang ada di Desa Kebong.

3. Agama

Pada Desa Kebong sendiri agama yang dianut oleh masyarakat Desa cukup bervariasi terdapat beberapa jenis agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kebong dan seluruh masyarakat memiliki agama, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki agama, walaupun ia adalah seorang bayi yang baru lahir ia sudah memperoleh agama dari agama yang telah dianut oleh kedua orangtua bayi tersebut. Adapun rincian pemeluk agama Desa Kebong dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Kristen	828	30,07
2.	Khatolik	841	30,55
3.	Islam	1.032	37,49
4.	Buddha	52	1,89
Total		2.753	100,00

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis agama dengan penganut terbanyak ada pada agama Islam dengan jumlah sebanyak 1.032 jiwa atau sekitar 37,50%. Hal ini membuktikan di Desa Kebong mayoritas agama adalah beragama Islam. Dan paling sedikit terdapat pada agama Budha dengan jumlah penduduk sebanyak 52 jiwa atau sekitar 2%. Dari total penduduk Desa Kebong berdasarkan Agama. Namun walaupun demikian, ternyata pada penduduk Desa Kebong, Masyarakat penganut Nasrani, yaitu Kristen dan Katolik ternyata hanya memiliki selisi 0,50% dari masing-masing total jumlah penduduk berdasarkan Agama, baik Agama Kristen maupun Khatolik.

Sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam menjalankan berbagai aktivitas, tidak terkecuali aktivitas keagamaan yang ada dalam masyarakat demi mencapai suatu tujuan keagamaan. Dengan adanya sarana prasarana dapat menciptakan kenyamanan, kepuasan pada masyarakat, mempercepat dan mempermudah proses kerja di masyarakat, meningkatkan produktivitas dan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan pada Masyarakat Desa. Berikut ini sarana prasarana Peribadatan yang ada di Desa Kebong, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6.
Sarana Prasarana Peribadatan

No.	Jenis Sarana Prasarana Ibadah	Jumlah (Buah)
1.	Masjid	3
2.	Surau	1
3.	Vihara	1
4.	Gereja	4
Total		9

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana untuk peribadatan Masyarakat desa kebong sebanyak 9 gedung bangunan, terdiri atas Masjid, Surau, Vihara dan Gereja. Dan Gedung Gereja merupakan Gedung peribadatan terbanyak yang ada di Desa Kebong, yaitu sebanyak 4 gedung atau sekitar 44,4% dari total sarana prasarana peribadatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 4 gedung gereja tersebut adalah 2 gereja Kristen dan 2 Gereja Khatolik. Dan paling sedikit adalah Surau dan Vihara, masing-masing 1 gedung peribadatan.

D. Kondisi Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup pada Masyarakat desa, tentulah Masyarakat harus melakukan kegiatan ekonomi. Seperti diketahui bahwa Sumber Ekonomi atau Mata Pencarian Penduduk Desa Kebong beragam. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7.
Jenis Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani dan Peternak	567	20,60
2.	PNS	110	4,00
3.	Tenaga Pengajar	22	0,80
4.	Wiraswasta	447	16,24
5.	Pelajar/Mahasiswa	463	16,82
6.	Swasta	110	4,00
7.	Tenaga Kesehatan	45	1,63
8.	Pedagang	64	2,32
9.	Ibu Rumah Tangga	56	2,03
10.	Tidak Bekerja/Belum Bekerja	545	19,80
11.	Pensiunan	45	1,63
12.	Pekerjaan Lain	279	10,13
Total		2.753	100,00

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa Pada Desa Kebong sendiri mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani dan peternak, yaitu sebanyak 567 orang atau sekitar 20% dari total jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian. Pada Masyarakat Desa Kebong sendiri bahwa ternyata Petani memiliki jenis pertanian berbeda-beda, yang ditekuni oleh masyarakat desa, baik itu petani padi sawah, petani sayur-sayuran, petani jagung, petani ubi kayu dan petani karet serta petani sawit. Untuk peternakan sendiri, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8.
Peternakan di Desa Kebong

No.	Peternakan	Jumlah Pemilik (Orang)	Jumlah Ternak (Ekor)
1.	Sapi	3	15
2.	Ayam Kampung	252	500
3.	Ayam Petelur	1	250
4.	Babi	56	123
5.	Kambing	5	22
6.	Kelinci	1	12
Total		318	922

Sumber Data: Data Kependudukan Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Dilihat pada tabel 2.8. di atas diketahui bahwa ternyata masyarakat desa yang melaksanakan kegiatan peternakan hanya sebanyak 318 orang atau sekitar 11,55% dari total jumlah penduduk Desa Kebong yaitu 2.753 orang. Dengan mayoritas peternak Ayam Kampung sebanyak 252 orang pemilik atau sekitar 79,24% dari total jumlah pemilik peternakan di Desa Kebong dan memiliki jumlah ternak sebanyak 500 ekor atau sekitar 54,22% dari jumlah ternak yang ada.

Namun ternyata, pada masyarakat Desa Kebong masih banyak masyarakat yang belum bekerja atau tidak bekerja. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7. di atas, bahwa mencapai 19,8% dari total penduduk Desa, dan hanya selisih 0,8% dari total mayoritas penduduk berdasarkan mata pencarian, yaitu petani dan peternak. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa Kebong. Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dapat memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat, membawa kearah perubahan yang positif. Hal ini telah terbukti dengan banyaknya dibangun rumah permanen yang terbuat dari beton, rata-rata memiliki sepeda motor, Televisi, Hand Phone, bahkan sudah banyak masyarakat yang memiliki Mobil. Dan secara umum pula sudah tidak ada lagi penduduk yang sulit untuk makan sehari-hari.

E. Kondisi Sosial dan Budaya

Di Desa Kebong masyarakat pada umumnya beretnis Dayak, sehingga dalam tatanan adat istiadat juga masih cukup kental mewarnai kehidupan sosial masyarakat, dan sampai saat ini masih ada tradisi yang masih dipelihara seperti Gawai Dayak, yaitu ucapan syukur yang dilaksanakan oleh masyarakat suku dayak setelah panen padi. Gunanya adalah untuk saling mengikat hubungan kekeluargaan

antar warga desa. Selain hal tersebut, pada masyarakat Desa Kebong dalam menumbuhkan kehidupan sosial masyarakat dan mempererat hubungan masyarakat, berbagai upaya telah pemerintah desa lakukan, seperti melaksanakan bakti sosial yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali pada masing-masing dusun, dan memperingati hari-hari raya, seperti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan HUT RI. Hal tersebut, menjadi kegiatan sosial rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya di Desa Kebong.

Selain itu, kehidupan sosial pada Masyarakat desa Kebong bahwa masih terdapat gotong-royong yang terjadi dimasyarakat. Masyarakat saling membantu jika ada salah satu warga desa melaksanakan kegiatan, seperti Pembangunan rumah, yaitu upacara tancap tiang pertama, pesta petunangan dan pernikahan. Hal tersebut membuktikan bahwa di Desa Kebong Masyarakat masih menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong-royong untuk saling membantu sesama warga desa.

Dalam penyelesaian perkara yang terjadi pada umumnya diselesaikan dengan cara Hukum adat, yang berjenjang dari Pengurus Adat, dan Temenggung dan apabila masih tidak dapat diselesaikan maka dapat melalui hukum positif atau hukum yang telah ditentukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Kondisi Pemerintahan Desa Kebong

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan didalamnya terjadi suatu proses menjalankan tugas, dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seiring perjalanan dan perkembangannya ternyata Desa Kebong sudah melahirkan beberapa pemimpin yang pernah memerintah Desa Kebong, sejak tahun 1988 sampai sekarang, yaitu sebanyak 6 (enam) orang pemimpin. Kepala desa sekarang di Desa Kebong, yaitu bapak Duman, S. Sos dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9.
Daftar Nama Kepala Desa Kebong berdasarkan Periode Jabatan

No.	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
1.	Yohanes Kiong	1988 – 1997	2 Periode
2.	Daeng	1998 – 2006	1 Periode
3.	Lambertus Jabang	2006 – 2013	1 Periode
4.	Duman, S.Sos	2013 – 2019	1 Periode
5.	Hasan	2019 – 2021	Pj. Kepala Desa
6.	Duman, S.Sos	2021-2027	Sekarang

Sumber Data: RPJMDes Desa Kebong Tahun 2021-2027.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Kebong menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (2 Kaur dan 2 Kasi), selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Pemerintah Desa Kebong

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Duman, S. Sos	Kepala Desa	S1	L
2.	Lisda, S. sos	Sekretaris Desa	S1	P
3.	Damyanus Yayan	Kaur TU dan Umum	SMA	L
4.	Rubina	Kaur Keuangan	SMK	P
5.	Satmin	Kasi Pemerintahan	SMA	L
6.	Hieronimus	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	SMK	L
7.	Fransiskus Sekundus	Dusun Kebong	SMA	L
8.	Petrus Taman	Dusun Sugai Putau	SMK	L
9.	Ignatius Ivan	Dusun Kenukut	SMK	L
10.	Liborius Andi	Dusun Kelam Raya	SMA	L
11.	Adrianus	Dusun Jemelak Hulu	SMA	L
12.	Jikhon	Dusun Dait	SMA	L
13.	Julia Meta Susika	Dusun Sebungkang	SMA	P
14.	Gregorius Gimang	Dusun Sungai Kelam	SMA	L

Sumber Data: RPJMDes Desa Kebong Tahun 2021-2027.

Penyelenggaraan pemerintahan desa bisa di katakan berhasil apabila pemerintah desa memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Pembagian tugas antara Kasi dan Kaur serta Dusun merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya pembagian tugas pada setiap bidang tersebut maka tidak akan ada penumpukan pekerjaan pada bidang tertentu. Sehingga setiap bidang dituntut untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangannya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Permendagri Nomor 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa, terdiri atas:

a. Sekretariat desa

Dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Di Desa Kebong Kepala Urusan terdiri atas 2 (dua) bidang urusan, yaitu kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Berikut uraian tugas dan kewenangan sekretariat desa:

1) Sekretaris Desa

Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2) Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b) Kepala urusan keuangan

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

b. Pelaksana Kewilayahan

Merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c. Pelaksana teknis

Merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan. Di Desa Kebong terdiri atas 2 (dua) Kasi, yaitu Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, dan Kasi Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- 1) Kepala seksi Pemerintahan

Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

2) Kepala seksi Pelayanan dan Kesejahteraan

Kasi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Dan Kasi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

G. Daftar Objek Wisata Desa Kebong

Objek Wisata adalah tempat yang menjadi sasaran Masyarakat atau pengunjung untuk menikmati keindahan sumber daya alam yang dimiliki pada suatu daerah atau wilayah. Berikut daftar objek wisata yang ada di Desa Kebong, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11.
Daftar Objek Wisata di Desa Kebong Tahun 2023

No.	Nama Objek Wisata	Jumlah
1.	Keling Kumang Agro Wisata	2
2.	Taman Wisata Alam Bukit Kelam	1
3.	Wisata Air Mancur Bukit Kelam	1
4.	Amazing Kelam	1
5.	Wisata Rohani Bukit Kelam	1
Total		6

Sumber Data: Pemerintah Desa Kebong, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa objek wisata yang ada di Desa Kebong terdapat 6 (enam) objek wisata resmi yang diakui oleh Pemerintah Desa Kebong dan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Dari ke-6 objek wisata tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa bersama dengan pemerintah supra desa dan bekerjasama dengan pihak swasta, yaitu Keling Kumang. Untuk hasil pengelolaannya maka akan menjadi keuntungan bersama dari ketiga pihak tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa di Desa Kebong masih banyak objek wisata, namun tidak terdaftar dikarenakan milik perorangan dan hasil pengolahan objek wisata akan menjadi keuntungan pribadi pada Masyarakat Desa Kebong. Seperti tempat pemancingan ikan, restoran, kolam renang dan hamparan sawah yang dimanfaatkan warga untuk menikmati keindahan bukit kelam. Objek wisata tersebut dikelola oleh sebagian Masyarakat Desa Kebong dalam memanfaatkan taman alam wisata Batu Kelam yang merupakan batu monolit terbesar di Dunia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, maka penulis pada bab ini akan berusaha memberikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan topik Skripsi. Kesimpulan dipaparkan berdasar atas hasil pengamatan dari data-data wawancara dengan 12 (dua belas) orang narasumber.

1. Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata

Pemerintah Desa Kebong belum memiliki Kapasitas, dikarenakan dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, lahan dilingkarkan objek wisata, adalah milik perorangan dan juga dikelola oleh koperasi masyarakat yang telah menjadi anggota pada CU Keling Kumang. Pemerintah desa sebagai pendukung masyarakat dalam pemanfaatan objek wisata dengan memberikan surat izin, melaksanakan pelatihan dan penyuluhan serta dilaksanakan seminar bagi masyarakat yang memiliki usaha pada bidang pariwisata.

2. Otoritas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata

Pemerintah Desa Kebong memiliki Otoritas dalam Perencanaan Pemanfaatan Objek Wisata, namun tidak memiliki Otoritas dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Objek Wisata. Hal ini disebabkan Pemanfaatan objek wisata, seperti wisata Bukit Kelam adalah otoritas dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan yang sah, mengatur dan memerintah Desa dalam pemanfaatan objek wisata di Desa Kebong.

B. SARAN

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka sebagai bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kebong

- a. Pemerintah desa harus mampu meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) baik dalam mengelola, menjalankan, mengimplementasikan sampai dengan mengevaluasi potensi wisata, dengan tetap memperhatikan Aksesibilitas dan infrastruktur di Desa.
- b. Pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa harus memiliki kreativitas, berinisiatif melakukan pekerjaan tidak harus selalu menunggu perintah dan arahan dari kepala desa.
- c. Perlu meningkatkan pendampingan dan pelatihan oleh tenaga ahli atau dari pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan objek wisata sehingga dapat mewujudkan kualitas, efektivitas dan efisiensi.

2. Bagi Masyarakat Desa Kebong

- a. Masyarakat harus mampu mengusulkan perencanaan dan terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan objek wisata.
- b. Masyarakat desa harus bisa memahami kapasitas dan otoritas pemerintah desa. tidak hanya selalu menuntut, tetapi ikut berpartisipasi di dalamnya.
- c. Masyarakat harus lebih mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam pemanfaatan objek wisata,

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. (2012). NEGARA DAN LEMAHNYA GOVERNABILITY (Studi Eksploitasi Pasir Galunggung di Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*)
- Cahyono, H., Zuhro, R.S., DKK. 2019. Penguatan *governability* dalam pengelolaan dana desa. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2politik – LIPI)
- FLORENSIUS, A. (2021). Pengelolaan Objek Wisata di Desa Kebong oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Kebong, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- Marceta, N. (2022). *Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi (Studi Governability di kalurahan Sambirejo, kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
- Putri, R.U. (2022). *Governability Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan* (Doctoral dissertation, SEKOLAHTINGGI PEMBANGUNA MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
- Padji, S.A. (2022). *Governabilitas Pemerintah Kalurahan dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Studi Kasus di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD")
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

SURAT IZIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
 * PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
 * PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B
 * PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
 * PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 300/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Kebong ,Kecamatan Kelayut, Kabupaten Sintang
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 27 Maret 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Leonardo Paskal
No Mhs : 18520213
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata (Penelitian di Desa Kebong, Kecamatan Kelayut, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)
Tempat : Desa Kebong, Kecamatan Kelayut, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Maret 2023



Ketua
Dr. Sutono Eko Yunanto
Telp. 170 230 190

SURAT TUGAS



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 149/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Leonardo Paskal
 Nomor Mahasiswa : 18520213
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
 Jenjang : Sarjana (S-1).
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian.

- a. Tempat : Desa Kebong, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
- b. Sasaran : Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Objek Wisata (Penelitian di Desa Kebong, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)
- c. Waktu : 27 Maret 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Ketua



Dr. Doro Eko Yunanto
NID. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



DUMAN S. SOS

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN SECARA UMUM

1. Apakah saudara/I mengetahui tentang perencanaan pembangunan di Desa?
2. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan?
3. Bagaimana pemerintah desa merespon aspirasi masyarakat terkait pembangunan di Desa?
4. Bagaimana dampak (positif/negative) pembangunan di Desa?
5. Apa kritik dan saran saudara/i terkait pembangunan di Desa?

A. Perencanaan

- 1.) Bagaimana proses perencanaan pemanfaatan objek wisata?
- 2.) Apakah terdapat kritik dan saran yang disampaikan dalam proses perencanaan?
- 3.) Bagaimana kepala desa menyikapi kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat?
- 4.) Apakah kepala desa sudah memiliki rencana dalam pemanfaatan objek wisata desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya musyawarah?
- 5.) Apakah pemanfaatan objek wisata desa disusun sesuai dengan peraturan?
- 6.) Bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam proses perencanaan?
- 7.) Apa saja rencana kegiatan dalam pemanfaatan objek wisata desa yang biasanya dilakukan oleh perangkat desa?
- 8.) Bagaimana pembagian tugas perangkat desa dalam proses perencanaan?
- 9.) Apakah ada perangkat desa yang tidak ikut serta dalam merencanakan kegiatan terkait pemanfaatan objek wisata?
- 10.) Bagaimana keterlibatan BPD dalam proses perencanaan kegiatan?
- 11.) Siapa saja yang dapat menyampaikan aspirasi dalam perencanaan kegiatan?
- 12.) Apa saja bentuk kegiatan perencanaan yang diusulkan oleh BPD?
- 13.) Mengapa BPD wajib ikut serta dalam perencanaan kegiatan?

- 14.) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan?
- 15.) Dalam proses perencanaan, pada tahap apa saja masyarakat ikut berpartisipasi?
- 16.) Bagaimana proses masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam perencanaan?
- 17.) Apa peran masyarakat dalam perencanaan?

B. Pelaksanaan

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan pemanfaatan objek wisata?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemanfaatan objek wisata?
- 3) Bagaimana peran kepala desa dalam proses pelaksanaan?
- 4) Apa saja bentuk pelaksanaan pemanfaatan objek wisata yang sudah dilaksanakan dan yang belum terlaksana?
- 5) Apa kendala pelaksanaan pemanfaatan objek desa sehingga tidak dapat terlaksana?
- 6) Bagaimana menyikapi pengelolaan dana desa yang tidak dapat dilaksanakan?
- 7) Bagaimana keterlibatan BPD dalam pelaksanaan kegiatan?
- 8) Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan?
- 9) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan?
- 10) Apakah BPD terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan?
- 11) Bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan?
- 12) Apa dampak pelaksanaan pemanfaatan objek wisata bagi masyarakat?
- 13) Apakah masyarakat mengetahui jenis pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa?
- 14) Bagaimana proses masyarakat terlibat dalam pelaksanaan?

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi Peneliti di Depan Kantor Desa Kebong



2. Dokumentasi Peneliti saat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kebong



3. Dokumentasi Peneliti di depan Objek Wisata Keling Kumang



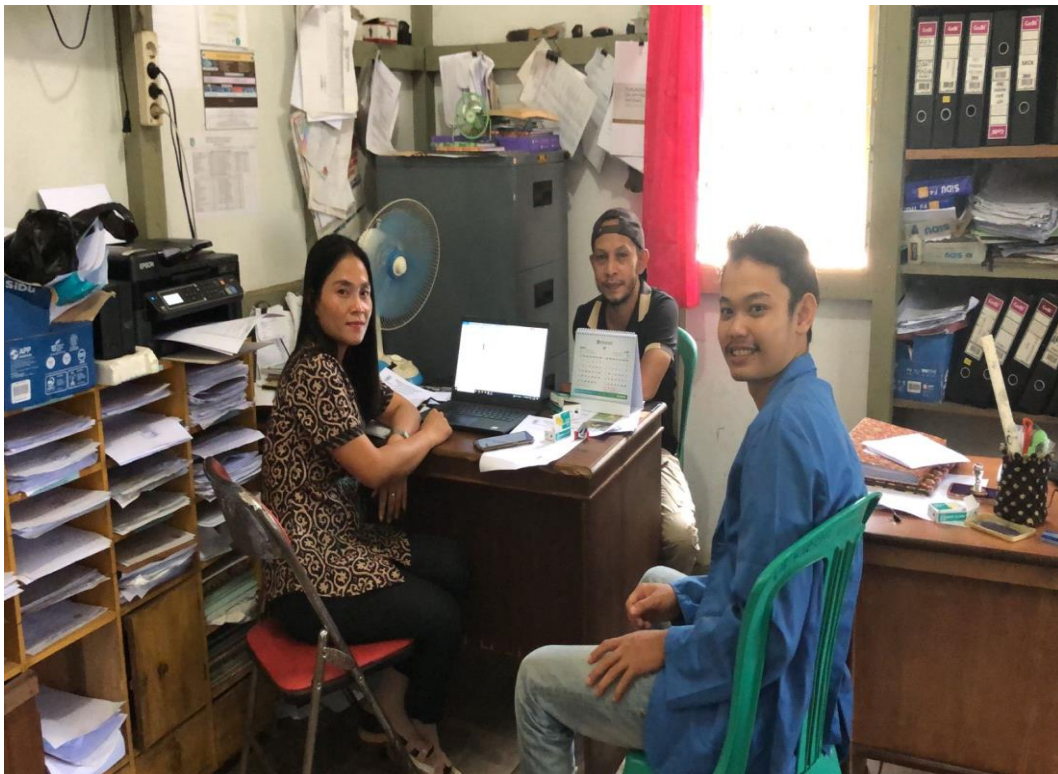
4. Dokumentasi Peneliti di depan Taman Wisata Alam Gunung Kelam



5. Dokumentasi Peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Kebong di depan BUMDes Kebong



6. Dokumentasi Peneliti dengan Bendahara Desa Kebong dan Sekretaris Desa Kebong



7. Dokumentasi Penelitian Objek Wisata Amazing Kelam di Desa Kebong



8. Dokumentasi Penelitian Objek Wisata Keling Kumang di Desa Kebong

PAKET WISATA

KOTA SINTANG

HARGA MULAI
Rp. 30.000/Orang
(*minimal 4 Orang)

DESTINASI WISATA

- KEDAI HIJAU
- DUNIA ANAK
- RUMAH KELINCI
- RUMAH AYAM MUTIARA
- SPOT FOTO LATAR BUKIT KELAM
- HUTAN SEKUNDER
- SAUNG
- PERMAINAN ADRENALIN
- RUMAH HIDROPONIK & REMPAH





FASILITAS :

- Gratis Parkir
- Ruang Mushola
- Ruang Manula dan Ibu Menyusui
- Alat Makan dan Minum Non Plastik
- CCTV
- Toilet Duduk dan Jongkok



KELING KUMANG AGROWISATA
Jl. Lingkar Kelam, Kelam Permai - Sintang (Kalbar)
Email : kelingkumangagrowisata@gmail.com

0811-5751-819

Instagram: [kelingkumangagrowisata](#) | Facebook: [Keling Kumang Agrowisata](#)